



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI SEMARANG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK INSENTIF RUKUN  
TETANGGA/RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT  
KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DI KELURAHAN DI KECAMATAN AMBARAWA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dukungan sumber daya berupa insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang pada Kelurahan Ngampin, Pojoksari, Tambakboyo, Lodoyong, Kupang, Kranggan, Panjang, dan Baran di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan penggunaan dana tambah uang untuk insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Daerah Tingkat II Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 120);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ( Berita Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor 121);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA TAMBAH UANG UNTUK INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA/LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN DI KECAMATAN AMBARAWA TAHUN ANGGARAN 2023.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Tambah Uang adalah pembiayaan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak atau sesuai dengan jadwal kegiatan yang menurut sifatnya harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda yang tidak dapat dicukupi dengan uang persediaan dan pembiayaan Langsung.
5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah mufakat dalam rangka memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
6. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka mengoordinasikan tugas dan fungsi RT di wilayah kerjanya.

7. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam rangka menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

## BAB II

### DANA TAMBAH UANG

#### Pasal 2

- (1) Besaran dana Tambah Uang untuk Insentif RT/RW/LKMK pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023 adalah Rp608.000.000,00 (enam ratus delapan juta rupiah).
- (2) Rincian dana Tambah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Kelurahan Kranggan sebesar Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 31 orang x Rp1.600.000,00 = Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
    2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.600.000,00 = Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - b. Kelurahan Lodoyong sebesar Rp73.600.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 45 orang x Rp1.600.000,00 = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah); dan
    2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.600.000,00 = Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - c. Kelurahan Kupang sebesar Rp129.600.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 80 orang x Rp1.600.000,00 = Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah); dan
    2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.600.000,00 = Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - d. Kelurahan Panjang sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 64 orang x Rp1.600.000,00 = Rp102.400.000,00 (seratus dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
    2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.600.000,00 = Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- e. Kelurahan Baran sebesar Rp65.600.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 40 orang x Rp1.600.000,00 = Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah); dan
  - 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.600.000,00 = Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- f. Kelurahan Tambakboyo sebesar Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 41 orang x Rp1.600.000,00 = Rp65.600.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah); dan
  - 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.600.000,00 = Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- g. Kelurahan Pojoksari sebesar Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 32 orang x Rp1.600.000,00 = Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
  - 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.600.000,00 = Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- h. Kelurahan Ngampin sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1. insentif Ketua RT dan Ketua RW : 39 orang x Rp1.600.000,00 = Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
  - 2. insentif Ketua LKMK : 1 orang x Rp1.600.000,00 = Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

### Pasal 3

- (1) Waktu penggunaan dana Tambah Uang untuk insentif RT/RW/LKMK Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ambarawa Tahun Anggaran 2023 adalah pada bulan Maret 2023.
- (2) Apabila dana Tambah Uang tidak habis digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada bulan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sisa Tambah Uang harus disetor kembali ke Rekening Kas Umum Daerah, kecuali:
  - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
  - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 21 Februari 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 21 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004